

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kabupaten Demak

Halaman 4

Rekonsiliasi Data untuk WTP



HM NATSIR
Bupati Demak

DEMAK - Dengan rekonsiliasi data realisasi APBD diperoleh kecocokan data dan informasi regulasi pengelolaan keuangan daerah. Demikian diungkapkan Bupati Demak HM Natsir pada acara rekonsiliasi data realisasi pendapatan dan belanja daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) triwulan II tahun anggaran 2017 kemarin.

Menurut bupati, dari hasil pemeriksaan BPK untuk Kabupaten Demak sejak tahun 2011 hingga tahun 2015, Pemkab hanya mendapatkan opini WDP. "Alhamdulillah tahun 2016 predikatnya naik menjadi WTP. Penghargaan ini saya dedikasikan untuk semua jajaran saya yang telah berjuang keras. Semoga kita dapat mempertahankan opini WTP ini di tahun-tahun mendatang," ujar bupati Natsir.

Bupati menambahkan bahwa ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama. Antara lain diharapkan agar kita dapat menindaklanjuti temuan-temuan BPK. Selain itu agar pelaksanaan SIMDA keuangan dapat berjalan efektif, diperlukan aparatur-aparatur yang berkualitas, profesional, dan berkompeten di bidangnya.

Aparatur yang memahami regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi dan tentu saja menguasai teknologi. Untuk itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya kegiatan rekonsiliasi ini demi keakuratan data pengelolaan keuangan daerah.

"Pengelolaan aset merupakan salah satu unsur penting yang menjadi landasan dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan aset harus dilakukan secara baik, tertib, dan sistematis," imbuhnya.

Sementara itu kepala BPKPAD Suhasbukit, SH, MM mengatakan kegiatan Rekonsiliasi data realisasi APBD sudah secara rutin dilakukan setiap triwulan. Kegiatan ini, sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 memegang peran penting untuk mendapatkan keakuratan data.

Dengan rekon akan diperoleh kecocokan data dan informasi regulasi pengelolaan keuangan daerah. "Penyusunan LK OPD tahun anggaran 2017 akan diawali bulan agustus ini dengan menyusun laporan keuangan semester I sehingga tidak akan menumpuk pada awal tahun berikutnya gunaantisipasi kesulitan yang mungkin muncul karena adanya perubahan perangkat daerah," terangnya. (adi/sgt)